

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM VETERINER*  
SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA TERHADAP SATWA  
YANG DILINDUNGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**OLEH :**

**DHIATRI NARI RATIH RENGGANINGATI**

**NIM 17501010111155**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2021**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi :** **KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM VETERINER* SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama :** Dhiatri Nari Ratih Rengganingati

**b. NIM :** 175010101111155

**Konsentrasi :** Hukum Pidana

**Jangka Waktu Penelitian :** 6 Bulan

**Disetujui pada tanggal :** 21 Oktober 2020

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. I Nyoman Nuriaya, S.H., M.S**  
**NIP. 195409251980031002**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M**  
**NIP. 197809142005011000**



# HALAMAN PENGESAHAN

## KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM VETERINER* SEBAGAI ALAT BUKTI KEJAHATAN TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI

### SKRIPSI

Oleh:

**DHIATRI NARI RATIH RENGGANINGATI**

**NIM 17501010111155**

Skrripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :12 Juli 2021

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S**

**NIP. 195409251980031002**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M**

**NIP. 197809142005011000**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



**Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196705031991032000**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat serta karunia yang tak ada hentinya, sehingga penulis dapat sampai pada tingkatan ini, tepatnya dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul "Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum Veteriner* Sebagai Alat Bukti Tindak pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi".

Sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah S.W.T atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan selama ini;
2. Kedua orang tua penulis, yakni Papa Teguh Prasetyo dan Mama Susiani yang selalu memanjatkan doanya, serta memberi dukungan moral maupun materiil;
3. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
4. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah bersedia menyisihkan waktunya untuk dapat memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah bersedia menyisihkan waktunya untuk membimbing dengan sabar dan juga memberikan dorongan kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Saudara kandung penulis, yaitu Dewa Brata Gajah Perdhana, Dyah Ayu Lintang Kawuryan, Dhingahayu Elang Basworo, Dyah Ayu Puspita Ramadhani, dan Dara Ayu Putri Pietaloka yang selalu memberikan dukungan dan semangat;



8. Wisnu Wardhana, selaku orang yang selalu memberikan dorongan, semangat, arahan, saran, dan motivasi kepada penulis, serta dengan sangat sabar menemani dan membantu penulis untuk berproses bersama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman dekat penulis yang selalu menghadirkan keceriaan selama perkuliahan dan memberikan bantuan serta dukungan selama penulisan skripsi ini (Alya Rizqika Haque, Anugrah Dwi Ayu Rizkiranitami, Nur Auliya Rahmatika, Sherly Anggiya Pratiwi, Pety Melati, Rhiyo Hattory, Rachmad Zidane, Derrick, Rana Dewi Salma, Nanda Nur Febriana)
10. Keluarga Besar Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Terima kasih kepada kakak-kakak dan adik-adik atas ilmu, pengalaman, serta kebersamaan selama tiga tahun.
11. Semua pihak yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu yang tentunya telah memberikan dukungannya, semangatnya dan doanya untuk kelancaran skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di penyusunan skripsi ini terdapat beberapa hal yang masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik yang membangun selalu penulis harapkan untuk dapat memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila dalam proses pembuatan skripsi ini telah melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak kelak, yang berminat mengguakan skripsi ini sebagai bahan bacaan atau sumber informasi.

Malang, 30 Mei 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tabel Orisinalitas Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum <i>Visum Et Repertum Veteriner</i> .....	15
1. Pengertian <i>Visum Et Repertum Veteriner</i> .....	15
2. Pengertian Veteriner dan Otoritas Veteriner.....	16
3. Dasar Hukum <i>Visum Et Repertum</i> .....	18
4. Bentuk <i>Visum Et Repertum</i> .....	19
B. Tinjauan Umum Pembuktian dan Alat Bukti.....	20
1. Pengertian Pembuktian.....	20
2. Sistem/Teori Pembuktian.....	21
3. Pengertian Alat Bukti.....	24
4. Jenis Alat Bukti.....	24
5. Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti.....	27
C. Tinjauan Umum Tindak pidana .....	28
D. Tinjauan Umum Satwa Yang Dilindungi.....	31
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Urgensi <i>Visum Et Repertum Veteriner</i> Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Terhadap Satwa yang Dilindungi .....	35



B. Kekuatan Pembuktian <i>Visum Et Repertum Veteriner</i> Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Terhadap Satwa yang Dilindungi.....	48
--	----

## **BAB IV PENUTUP .....60**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

## **DAFTAR PUSTAKA .....62**



## RINGKASAN

Dhiatri Nari Ratih Rengganingati, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2021, KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM VETERINER* SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Kekuatan Pembuktian dari *Visum Et Repertum Veteriner* Sebagai Alat Bukti Dalam Penegakan Hukum Tindak pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi. Pemilihan terhadap tema tersebut dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya kasus tindak pidana terhadap satwa dilindungi dari hari ke hari. Dan akibat dari kurang efektifnya penegakan hukum terhadap permasalahan ini, maka sangat diperlukan perkembangan metode pembuktian yang berdasar pada ilmu kedokteran hewan forensik.

Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana urgensi *visum et repertum veteriner* sebagai alat bukti tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi ? (2) Bagaimana kekuatan pembuktian dari *visum et repertum veteriner* sebagai alat bukti tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi?

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis, dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal dan teknik penafsiran sistematis. Hasil analisis mengungkapkan bahwa faktor utama tidak terselesaikannya kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi adalah kurangnya alat bukti. Dan kehadiran *Visum Et Repertum Veteriner* dari keilmuan dokter hewan forensik dapat menjadi suatu bentuk perkembangan sebagai metode pendekatan dalam proses penyidikan. *Visum Et Repertum Veteriner* juga telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 184 KUHP.

**Kata Kunci : Kekuatan Pembuktian, Visum Et Repertum Veteriner, Satwa Dilindungi**



## SUMMARY

Dhiatri Nari Ratih Rengganingati, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, March 2021, The Power of *Visum Et Repertum Veteriner* as a Piece of Evidence in a Criminal Offence against Protected Animals, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S., Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M.

In this thesis, the author raises issues related to The Power of *Visum Et Repertum Veteriner* as a Piece of Evidence in a Criminal Offence against Protected Animals. The choice of this theme is based on the fact by the increasing number of cases of criminal actions against protected animal from day by day. And the lack of effective law enforcement on this problem, it is necessary to develop evidence methods based on forensic veterinary science.

Based on this, this paper raises the formulation of the problem : (1) How is the urgency of *visum et repertum veteriner* as a piece of evidence in a criminal offence against protected animals ? (2) How is the power of *visum et repertum veteriner* as a piece of evidence in a criminal offence against protected animals ?

The writing of this thesis uses a normative juridical research method with a statutory approach and a conceptually approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author were analyzed using grammatical interpretation techniques and systematic interpretation techniques.

The result of this thesis show that the main factor in the unresolved case of crimes against protected animal was the lack of evidence. And the presence of veterinary *visum et repertum* from forensic veterinary science can be a form of development as an approach method in the investigation process. Veterinary *visum et repertum* has also fulfilled as valid evidence as contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code.

**Keywords : Evidentiary Power, *Visum Et Repertum Veteriner*, Protected Animals**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keanekaragaman hayati telah menjadi salah satu aset yang paling berharga dalam suatu Negara, sebab keberadaannya menjadi salah satu daya tarik bahkan identitas Negara. Indonesia sendiri telah menjadi salah satu negara di Asia yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, baik hayati maupun non hayati. Keberadaannya memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi penduduknya. Indonesia mempunyai tingkat keanekaragaman hayati dengan keunikannya yang sangat tinggi, sehingga termasuk dalam kategori negara *mega biodiversity*. Memiliki predikat seperti itu tentunya sangat membanggakan bagi Indonesia, namun disamping itu juga memberikan tanggungjawab yang besar untuk mempertahankan dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut.

Menurut catatan terakhir pada tahun 2014 tentang Indonesia sebagai negara *mega biodiversity*, diperkirakan di Indonesia terdapat beberapa jenis spesies satwa yang dikategorikan sebagai satwa dilindungi dan yang tidak dilindungi, dengan jumlah sekitar 720 spesies mamalia, 1599 spesies burung, 385 spesies amfibi, 723 spesies reptile dan berbagai jenis spesies lainnya.<sup>1</sup>

Tingkatan rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat maupun pemerintah dalam hal pentingnya menjaga dan melindungi satwa, masalah menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia. Banyak sekali fenomena perbuatan manusia terhadap hewan yang mengganggu kesejahteraan satwa dengan tidak bertanggungjawab. Diantaranya seperti penganiayaan terhadap satwa, perdagangan organ satwa, eksploitasi satwa, dan pembunuhan satwa. Berbagai bentuk perbuatan tersebut tentunya dapat mengancam keberlangsungan hidup dari satwa, dan memberikan dampak secara langsung terhadap penurunan populasi dari satwanya.

<sup>1</sup> Hariyawan, **Catatan Akhir Tahun : Indonesia, Negara Megabiodiversity Yang Rentan Kehilangan Satwa Dilindungi**, MONGABAY Situs Berita Lingkungan (diakses pada tanggal 9 Oktober 2020, pukul 14.41 WIB)



Salah satu kejahatan yang marak terjadi adalah pembunuhan satwa, seperti pada kasus pembunuhan seekor bekantan yang dilakukan oleh Bapak Samani, warga Sei Pitung, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Karena perbuatannya, beliau dijerat dengan Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan pengertian :

"Satwa ialah semua jenis Sumber Daya Alam hewani yang hidup di darat, air dan udara".

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini juga menggolongkan jenis satwa menjadi dua, yaitu satwa dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi.

Regulasi terkait perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi telah secara tegas dimuat dalam Pasal 21 Ayat (2) yang menyatakan :<sup>3</sup>

"Setiap orang dilarang untuk :

- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat didalam atau diluar Indonesia;
- d) Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia;
- e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi".

<sup>2</sup> Kasriadi, "Polisi Kapuas tangkap pelaku pembunuhan satwa dilindungi", <https://www.antaranews.com/berita/1554036/polisi-kapuas-tangkap-pelaku-pembunuhan-satwa-dilindungi#mobile-nav>, diakses 21 Juni 2021

<sup>3</sup> Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang **Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419



Diperlukan keberadaan regulasi yang memuat mengenai sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (2) diatas, agar ketentuan tersebut dapat ditaati oleh masyarakat. Ketentuan sanksi ini dimuat dalam Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat (4), yang menyatakan :

"Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"<sup>4</sup>

"Ayat (4) Barang siapa karena kelaliannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)"<sup>5</sup>

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) telah diatur dengan tegas mengenai tindakan manusia yang dapat merugikan keberlangsungan hidup hewan, seperti; penganiayaan, kekerasan, dan sebagainya. Tindak pidana penganiayaan terhadap hewan ini diatur pada Pasal 302 KUHP yang dikategorikan menjadi penganiayaan hewan ringan dan penganiayaan hewan, yang menyatakan<sup>6</sup> :

1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya";

<sup>4</sup> Ibid.,

<sup>5</sup> Ibid.,

<sup>6</sup> Pasal 302 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang **Peraturan Hukum Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660



- 2) "Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan".

Pada proses penegakan hukumnya, diperlukan proses penyidikan yang tepat untuk dapat tertuju pada pelaku. Dalam tindak pidana tindak pidana terhadap satwa, tentunya proses pengidentifikasian korban serta pengumpulan bukti menjadi salah satu tugas penyidik yang memiliki peran sangat penting. Terkait penyidikannya, telah diatur secara spesifik di ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan<sup>7</sup> :

- 1) "Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi pembinaan konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya;
- 2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk :
  - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
  - c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
  - d. Melakukan penggeledahan;

<sup>7</sup> Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang **Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419



- 4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana<sup>8</sup>.

Upaya dari aparat penegak hukum yang dapat dilakukan guna mencari kebenaran materiil atas suatu tindak pidana, juga telah secara tegas dimuat dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”<sup>8</sup>

Dengan adanya ketentuan yang disebutkan diatas, sehingga dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk mencari serta menghimpun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dan ketentuan mengenai alat bukti sah sendiri, telah diatur dengan tegas di Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya ditulis KUHAP) yang menyatakan<sup>9</sup> :

- 1) “Bukti yang sah adalah :
  1. keterangan saksi
  2. keterangan ahli
  3. surat
  4. petunjuk
  5. Keterangan terdakwa”

Dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap satwa dilindungi, akan sangat sulit untuk memperoleh bukti jika penyidik hanya melakukan tugasnya sendiri. Maka dari itulah diperlukan adanya bantuan seorang ahli guna memperoleh bukti yang sah, yang dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

<sup>8</sup> Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang **Kekuasaan Kehakiman**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

<sup>9</sup> Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209



"Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau memiliki keahlian khusus".<sup>10</sup>

Pada proses penyidikan tindak pidana menyangkut dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa, penyidik memerlukan bantuan dokter ahli untuk memperoleh bukti yang sah. Bantuan seorang ahli ini tentunya dapat mempermudah mengungkap suatu perkara. Oleh sebab itu, penyidik memiliki wewenang untuk mendapatkan bantuan ahli dalam hal diluar dari kompetensi penyidik. Hal ini termuat dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP, yang menyatakan :

"Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman dan dokter ahli lainnya".<sup>11</sup>

Salah satu langkah dalam meyakinkan hakim terkait bersalah atau tidak bersalahnya pelaku, salah satunya dengan bantuan ilmu lain yaitu Forensik. Penggunaan ilmu Forensik dalam pembuktian telah banyak digunakan dan berkembang di negara maju sebagai alat bukti yang sah, namun di Indonesia sendiri kurang digunakan. Bantuan dari seorang dokter ahli untuk keperluan penyidikan, diwujudkan dalam bentuk laporan pemeriksaan medis yaitu *Visum Et Repertum Veteriner* yang merupakan laporan yang memiliki bentuk tertulis yang didalamnya berisi hasil pemeriksaan medis guna mencapai penegakan peradilan dan atas permintaan dari penyidik.

Banyaknya peristiwa pembunuhan terhadap satwa dilindungi ini tentunya harus segera dihentikan dan dihilangkan. Namun karena faktor kurangnya bukti yang didapat, membuat terabaikannya beberapa kasus tindak pidana terhadap satwa dilindungi. Dalam hal ini seharusnya diterapkan juga bantuan ahli forensik dalam proses penyidikan yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa hewan. Karena dengan bantuan dokter hewan forensik, penyidik akan mendapatkan bukti yang sah untuk membantu penegakan hukum tindak pidana terhadap hewan.

<sup>10</sup> *Ibid*,.

<sup>11</sup> *Ibid*,.



Dengan adanya regulasi-regulasi yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dokter hewan forensik sangatlah penting dalam penyelesaian tindak pidana terhadap satwa dilindungi karena dapat mempermudah penyidik dalam proses penegakan hukumnya. Sehingga diperlukan adanya pengakuan hukum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berperan sebagai sarana pembuktian dalam penegakan hukum. Hal ini perlu diatur dalam suatu penormaan, agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Upaya penegakan hukum untuk melindungi satwa yang dilindungi ini harus dilaksanakan, agar satwa dilindungi tidak semakin punah. Karena bisa saja kemungkinan satwa yang telah punah atau hampir punah tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberlanjutan keseimbangan ekosistem. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **"Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum Veteriner* Sebagai Alat Bukti Tindak pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi"**

B. Tabel Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1  
Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Shindu Aris Permadi, Universitas Brawijaya, 2015	"Peran <i>Visum Et Repertum</i> Dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan"	Penelitian ini menganalisis mengenai peran dari <i>Visum Et Repertum</i> yang digunakan dalam suatu proses penyelidikan dari tindak pidana penganiayaan.



2	Lisia Tania, Universitas Dharmawangsa, 2019	"Tinjauan Yuridis Mengenai Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan"	Penelitian ini menganalisis pandangan dari segi hukum terkait penegakan hukum dari tindakan penganiayaan hewan bagi pelakunya.
3	Riski Yulianto Saputro, Universitas Islam Sultan Agung, 2019	"Tinjauan Yuridis <i>Visum Et Repertum</i> Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan"	Penelitian ini menganalisis pandangan hukum dari <i>Visum Et Repertum</i> dalam suatu proses pembuktian tindak pidana pembunuhan.

*Sumber: Bahan Hukum Sekunder, 2021*

Berdasarkan tabel orisinalitas penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup jelas dalam fokus penelitian yang menjadi acuan penulis dalam penyusunan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada kekuatan pembuktian dari *Visum Et Repertum Veteriner* sebagai salah satu alat bukti dalam tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi. Selain itu, terdapat juga perluasan subyek hukum dalam penelitian ini, yakni subyek hukum hewan.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi *Visum Et Repertum Veteriner* sebagai alat bukti tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum Veteriner* sebagai alat bukti tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi ?



#### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis terkait urgensi dari *Visum Et Repertum Veteriner* sebagai alat bukti tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kekuatan pembuktian dari *Visum Et Repertum Veteriner* sebagai alat bukti tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi.

#### E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana khususnya, tentang *Visum Et Repertum Veteriner* sebagai alat bukti dan sebagai referensi untuk peneliti berikutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a) Manfaat bagi Akademisi

Sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan kepada mengenai perkembangan dalam penegakan hukum dan *Visum Et Repertum Veteriner* sebagai alat bukti tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi.

###### b) Manfaat bagi Masyarakat

Sebagai tambahan wawasan ilmu dan bahan bacaan mengenai kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum Veteriner* sebagai alat bukti tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi.

###### c) Manfaat bagi Penyidik

Sebagai sumber pengetahuan serta bahan masukan kedepannya mengenai penggunaan *Visum Et Repertum Veteriner* sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi.

###### d) Manfaat bagi Dokter Hewan Forensik

Sebagai tambahan wawasan serta bahan masukan kedepannya agar dokter hewan forensik sebagai seorang yang ahli dibidangnya, dapat turut serta dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap satwa dilindungi.



e) Manfaat bagi Pemerintah

Sebagai sumbang saran terkait kejelasan atas produk hukum dari keabsahan *Visum Et Repertum Veteriner* sebagai salah satu dari alat bukti dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap satwa dilindungi.

## F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan yakni :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang pengumpulan bahannya dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka terkait. "Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum".<sup>12</sup> "Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai inti dari sistem norma yang ada. Sistem norma yang dimaksud disini ialah norma peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin".<sup>13</sup> Berdasarkan jenis penelitiannya, tujuan penyusunan penelitian ini untuk menafsirkan perundang-undangan yang berhubungan dengan *Visum Et Repertum Veteriner* sebagai alat bukti dalam tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum tentunya membutuhkan pendekatan tertentu sebagai dasar untuk menganalisis dan membentuk suatu argumen hukum yang tepat. Metode pendekatan dalam penelitian hukum mempunyai peranan yang sangat penting yaitu sebagai pedoman dalam mempelajari dan menganalisis suatu permasalahan hukum yang akan diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Noratif Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 12-13

<sup>13</sup> Mukti Fajar, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 34



adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan ini merujuk pada doktrin serta pendapat hukum dari para ahli hukum, serta konsep hukum, yang berdasarkan dari literatur dan jurnal hukum. Sehingga atas dasar doktrin serta pendapat hukum dari ahli tersebut, penulis dapat menyimpulkan pengertian dan konsep yang relevan dengan isu yang diteliti.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Jenis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang tidak terpaku dengan adanya data. Oleh karena itu, diperlukan sumber penelitian untuk menyelesaikan masalah hukum dan memberikan ketentuan terkait yang sebenar-benarnya.<sup>14</sup> Jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis, adalah :

1) Bahan Hukum Primer

"Bahan hukum primer yang dimaksud diantaranya ialah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta risalah pembentukan perundang-undangan dan putusan hakim"<sup>15</sup>

Dalam hal ini bahan hukum primer menjadi bahan hukum utama dalam pembuatan suatu penelitian.

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya adalah :

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana, Jakarta, 2014, hal 55

<sup>15</sup> Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum (Cetakan III)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal



- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner”.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Salah satu bahan hukum yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer ialah bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini juga sangat berperan penting dalam proses menganalisis serta menginterpretasikan bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah. Selain itu penulis juga menggunakan wawancara dengan narasumber sebagai salah satu bahan hukum sekunder penelitian ini.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdapat pula suatu bahan hukum yang memiliki peran dalam ikut serta menyokong kedua bahan hukum sebelumnya, yakni bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan situs internet yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

## b. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga bahan yang diperoleh merupakan data sekunder yang dapat diperoleh dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.



#### 4. Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelusuran bahan hukum, seperti :

##### a) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, serta tersier yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori atau pendapat hukum.

##### b) Akses Internet

Pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan mengakses website resmi, jurnal online, maupun media online lainnya.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif ialah suatu jenis penelitian yang merujuk pada norma hukum yang berlaku dalam suatu peraturan serta putusan pengadilan, dan juga dengan menganalisis adanya hubungan atau keterkaitan antar peraturan tersebut, sehingga jenis penelitian ini dapat dikaakan memiliki sifat kualitatif.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik interpretasi gramatikal, yakni cara penafsiran yang menafsirkan perundang-undangan menurut bahasa dan arti kata (istilah).

Selain itu, penulis juga menggunakan teknik penafsiran sistematis, yakni suatu cara menentukan suatu struktur hukum, dimana dalam penelitian ini metode interpretasi jenis ini dilakukan dengan turut menafsirkan dan memperhatikan naskah hukum lain.<sup>17</sup> Dalam hal ini dilakukan penafsiran suatu pasal dalam Undang-Undang dengan ketentuan yang sama dan berhubungan dengan peraturan lain guna dijadikan acuan dalam menentukan makna selanjutnya.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 105

<sup>17</sup> Cindy Zafira Husna, **Analisis Perbandingan Ruang Lingkup Dan Sanksi Insider Trading Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Securities Exchange Act Of 1934** (Studi Pengaturan di Indonesia dan Amerika Serikat), Skripsi, Jakarta, 2018, hal 45



## 6. Definisi Konseptual

Untuk mencegah adanya kesalahan penafsiran, maka penulis memberikan Definisi Konseptual sebagai berikut :

### a. *Visum Et Repertum*

*Visum Et Repertum* dalam penelitian ini suatu laporan dalam bentuk dokumen tertulis yang dibuat dan disahkan oleh dokter forensik dari permintaan penyidik terkait pemeriksaan tubuh berdasarkan keilmuannya dibawah sumpah jabatan.

### b. *Veteriner*

Veteriner dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berkaitan mengenai hewan.

### c. Pembuktian

Pembuktian dalam penelitian ini adalah cara untuk meyakinkan hakim mengenai segala hal yang telah dikemukakan yang terdiri dari alat-alat bukti.

### d. Tindak pidana

Segala perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

### e. Satwa Yang Dilindungi

Satwa dilindungi dalam penelitian ini adalah satwa hidup maupun mati beserta bagian-bagian darinya yang diatur dalam perundang-undangan sebagai satwa dilindungi.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum *Visum Et Repertum Veteriner*

##### 1. Pengertian *Visum Et Repertum*

*Visum Et Repertum* merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Latin yakni *visa* yang memiliki makna "melihat/memandang", dan *repertum* yang memiliki makna "melapor". Maka jika diringkas, *Visum Et Repertum* memiliki makna apa yang dilihat mengenai segala sesuatu yang ditemukan melalui barang bukti, dan melaporkannya terkait apa saja yang diperoleh dari pemeriksaan korban. Frasa yang dikenal sebagai *Visum Et Repertum* atau VER itu sendiri merupakan suatu istilah yang lazim digunakan dalam dunia kedokteran forensik. "Menurut Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 *Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya".<sup>18</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*Visum Et Repertum* bermakna suatu surat yang didalamnya memuat keterangan dari dokter tentang hasil pemeriksaan medis".<sup>19</sup> Kemudian menurut kamus hukum, "*Visum Et Repertum* ialah surat atau laporan yang berisi keterangan dari seorang ahli mengenai pemeriksaannya terhadap sesuatu".<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Njowito Hamdani, "*Visum Et Repertum* merupakan keterangan tertulis mengenai pengamatan atas sesuatu yang diperiksa, yang dikeluarkan oleh seorang dokter ahli yang mendapatkan sumpah jabatan, serta memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam pengadilan".

<sup>18</sup> Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350

<sup>19</sup> Tim Prima Pena, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Gitamedia Press, Bandung, 2012, hal 794

<sup>20</sup> J.C.T Simorangkir dkk, **Kamus Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 183



Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong, "*Visum Et Repertum* berperan penting dalam sistem pembuktian karena mengganti sepenuhnya barang bukti (*Corpus-Delicti*) dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh dan kesehatan".<sup>21</sup> Sedangkan *Visum Et Repertum* menurut Abdul Mu'ni Idris ialah "suatu penemuan dan pemeriksaan barang bukti yang pada akhirnya terbentuk suatu kesimpulan dari dokter yang disumpah, dan terwujud dalam suatu laporan pemeriksaan dengan tujuan kepentingan peradilan".<sup>22</sup>

Dari beberapa definisi *Visum Et Repertum* yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa *Visum Et Repertum* ialah suatu dokumen pemeriksaan medis yang berbentuk tertulis dan dibuat oleh dokter forensik berdasarkan sumpah, mengenai segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan melalui pemeriksaan dari barang bukti tersebut, menurut pengetahuannya dan untuk tujuan penegakan hukum.

## 2. Pengertian *Veteriner* dan *Otoritas Veteriner*

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, disebutkan bahwa "*Veteriner ialah segala hal yang berhubungan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan*". Sedangkan "Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memiliki tanggung jawab dan berkompeten dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan". Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa "Kesehatan hewan adalah segala hal yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta menjamin keamanan dari produknya, kesejahteraannya, serta peningkatan akses yang mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan".<sup>23</sup>

"Otoritas Veteriner memiliki tugas terkait persiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan."<sup>24</sup>

<sup>21</sup> R.Atang Ranomihardja, **Ilmu Kedokteran Kehakiman(Forensick Scince)**, Penerbit Tarsito, Bandung, 1983, hal 18

<sup>22</sup> Wahyudi, **Ilmu kedokteran kehakiman dalam perspektif peradilan dan aspek hukum praktik kedokteran**, Jdambatan, Jakarta, 2000, hal 26

<sup>23</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang **Otoritas Veteriner**, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6019

<sup>24</sup> *Ibid*,



Sedangkan untuk fungsi dari otoritas veteriner telah dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, antara lain<sup>25</sup> :

- a. Pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- c. Pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
- d. Pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
- e. Pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
- f. Pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
- g. Pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
- h. Pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
- i. Pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
- j. Pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
- k. Pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
- l. Penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
- m. Penjamin keamanan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan;
- n. Penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- o. Pengelola medik akuatik dan medik konservasi.”

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, dapat diketahui bahwa otoritas veteriner memiliki kewenangan sebagai pengawas atas berbagai perbuatan penganiayaan maupun penyalahgunaan terhadap hewan serta sebagai pelaksana dari perlindungan hewan dan lingkungannya.

Menurut Pasal 21 Ayat (2) huruf b, yang menyatakan :

“Dokter hewan forensik juga memiliki kewenangan untuk membuat laporan Visum Et Repertum dalam ranah Veteriner guna kepentingan adanya indikasi penyakit hewan yang menular, membahayakan kesehatan manusia, hewan, maupun lingkungan sekitarnya”

<sup>25</sup> Ibid,



### 3. Dasar Hukum *Visum Et Repertum*

Dasar hukum *Visum Et Repertum* terdapat dalam Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, dan Pasal 184 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 120 KUHP menyatakan<sup>26</sup> :

1. "Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau yang memiliki keahlian khusus";
2. "Ahli tersebut harus mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta".

Kemudian Pasal 133 KUHP menyatakan<sup>27</sup> :

1. "Dalam hal penyidik untuk kepentingan pengadilan mengenai seorang korban, baik luka, keracunan atau mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli dokter kehakiman atau dokter dan ahli lainnya";
2. "Permintaan keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat";
3. "Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagaian badan mayat lain".

Selanjutnya Pasal 179 KUHP menyatakan<sup>28</sup> :

1. "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan";
2. "Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang

<sup>26</sup> C.S.T Kansil, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hal 60

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 64

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 84



sebaik-baiknya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya”.

#### 4. Bentuk *Visum Et Repertum*

Ketentuan umum struktur *Visum Et Repertum* ialah sebagai berikut<sup>29</sup> :

- a) “Menuliskan frasa PRO YUSTISIA pada sisi kiri bagian atas, hal ini menunjukkan bahwa isi dari *Visum Et Repertum* digunakan untuk keperluan peradilan;
- b) Pada bagian tengah, dituliskan frasa *Visum Et Repertum* diikuti dengan nomor VeR nya;
- c) Pendahuluan :
  1. Identitas dari pemohon/yang meminta
  2. Identitas surat permohonan
  3. Waktu penerimaan surat permohonan
  4. Identitas dokter yang membuat laporan pemeriksaan
  5. Identitas korban atau yang menjadi barang bukti
  6. Keterangan kejadian (berdasarkan surat permohonan);
- d) Pemberitaan, yang didalamnya berisi hasil dari pemeriksaan oleh dokter terhadap yang diperiksa pada korban/barang bukti;
- e) Kesimpulan, yang berisi keterangan/pendapat dari dokter yang berwenang memeriksa, terkait hasil pemeriksaan yang berdasar pada pengetahuannya yang sebaik-baiknya;
- f) Penutup, yang berisi keterangan dari dokter yang memeriksa bahwa laporan pemeriksaannya dibuat atas sumpah dari penerimaan jabatan;
- g) Pada sisi kanan bagian atas, menuliskan identitas berupa nama, tanda tangan, dan cap dari dinas dokter pemeriksaan”.

Berdasarkan bentuknya sebagaimana disebutkan diatas, yang dikatakan sebagai pengganti dari barang bukti ialah pada bagian huruf d yakni pemberitaan. Sementara itu dalam bagian huruf e yakni

<sup>29</sup> H.M. Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hal 4



kesimpulan, memuat mengenai keterangan opini dari dokter yang memeriksa.

## B. Tinjauan Umum Pembuktian dan Alat Bukti

### 1. Pengertian Pembuktian

Secara etimologi, dalam bahasa Belanda frasa membuktikan ialah bentuk lain dari kata *bewijzen*, yang memiliki arti suatu usaha guna mengungkapkan kebenaran dari suatu peristiwa. Menurut Subekti, dijelaskan bahwa Membuktikan ialah suatu cara untuk dapat memberikan keyakinan kapa hakim terkait kebenaran dari dalil-dalil yang diutarakan dalam suatu permasalahan.

Sedangkan Van Bemmelen, mengemukakan bahwa Pembuktian ialah suatu upaya untuk mendapatkan kebenaran dengan cara memeriksa dengan keyakinan yang logis dari hakim, mengenai apakah peristiwa tersebut benar-benar pernah terjadi, dan mengapa peristiwa itu terjadi.

Sistem pembuktian menurut hukum acara Indonesia diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang menyatakan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya".<sup>30</sup>

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 183 KUHP, dapat diketahui bahwa guna menentukan bersalah atau tidaknya seseorang dan guna menentukan pidananya, maka kesalahannya diperlukan sebuah pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan, sehingga hakim dapat mencapai keyakinannya bahwa tindak pidana itu benar terjadi dan pelakunya benar-benar bersalah.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 4



## 2. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian memiliki tujuan untuk mengetahui cara menentukan pembuktian terhadap suatu perkara pidana. Terdapat beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu<sup>32</sup> :

### 1. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut sistem ini salah atau tidaknya terdakwa ditentukan atas ada tidaknya alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang. Apabila hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, namun dalam pemeriksaan tidak disertai alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang, maka pelaku harus dibebaskan. Sedangkan apabila pelaku dalam pemeriksaannya telah memenuhi alat bukti yang sah dan cara pembuktian berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka pelaku tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, meskipun hakim tidak memiliki keyakinan akan kesalahannya.

Kelebihan dari sistem ini adalah mempercepat jangka waktu penyelesaian dari perkara untuk perkara pidana yang ringan dan memberikan kemudahan pada hakim dalam mengambil keputusan, dikarenakan resiko kesalahannya sangat kecil. Sedangkan kekurangannya adalah tidak memberikan kepercayaan terhadap keyakinan dan pertimbangan dari hakim, yang tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana di Indonesia.<sup>33</sup>

Sistem ini terkadang dikenal juga dengan teori pembuktian formal (*Formale Bewijstheorie*).<sup>34</sup>

### 2. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*Negative Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa hakim hanya boleh memberikan putusan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah alat bukti yang sah berdasarkan Undang-

<sup>32</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 245

<sup>33</sup> Munir Fuady, **Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 20

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *loc.cit.*



Undang, diikuti dengan adanya keyakinan dari hakim berdasar atas alat bukti tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap, "Dalam sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif, keberadaan alat bukti yang sah diikuti dengan keyakinan dari hakim atas pembuktian dari alat bukti sah tersebut, yang dapat menentukan salah atau tidaknya seorang pelaku".<sup>35</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, menunjukkan bahwa sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif ini menjadi sistem pembuktian yang tepat digunakan dalam sistem hukum di Indonesia. Pernyataan ini didukung dengan adanya aturan dalam Pasal 183 KUHP, yang menyatakan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut<sup>37</sup> :

- a. Tujuan dari proses pembuktian ialah guna memutus suatu perkara pidana, yang apabila telah memenuhi dari syarat pembuktian maka dapat dijatuhkan pidana;
- b. Batasan atau kriteria terkait hasil dari pembuktian guna memberikan putusan pidana.

Kelebihan dari sistem ini adalah keyakinan hakim ini terbentuk berdasarkan realita yang didapatkan dari alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Sehingga dalam pembuktiannya benar-benar menghasilkan kebenaran yang sebenarnya, dan kemungkinannya sangat kecil untuk terjadi penerapan hukum yang salah. Sedangkan

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hal 258

<sup>36</sup> Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

<sup>37</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, **Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**, Elsam, Jakarta, 2007, hal 3



kekurangan sistem ini adalah memperlambat waktu dalam membuktikan dan memutuskan suatu perkara pidana.

### 3. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction In Time*)

Menurut sistem ini, pelaku dianggap bersalah atau tidak, sepenuhnya bergantung pada keyakinan dari hakim semata. Keyakinan dari hakim ini tidak selalu berdasarkan pada kehadiran alat bukti. Meskipun alat bukti yang sah telah mencukupi, namun jika tidak ada keyakinan dari hakim bahwa terdakwa bersalah, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan. Dan sebaliknya, meskipun tanpa alat bukti sah, namun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah, maka dapat dijatuhkan putusan.

Kelemahan dari sistem ini adalah terlalu banyaknya kepercayaan yang diberikan pada hakim, sehingga dapat saja hakim berbuat semata-mata saat menjatuhkan pidana.

### 4. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim serta alasan yang logis (*Conviction In Raisoné*)

Sistem pembuktian ini juga masih mengedepankan penilaian atas keyakinan dari hakim, namun keyakinan hakim ini harus diikuti oleh alasan yang logis dan dapat dipahami dengan akal sehat. Meskipun kategori alat bukti yang sah telah dimuat dalam Undang-Undang, akan tetapi hakim dapat menggunakan alat bukti lain diluar yang telah diatur di dalam Undang-Undang.

Poin penting dalam sistem ini adalah, keyakinan hakim haruslah berdasarkan atas *reasoning* atau alasan, dan alasan tersebut harus *reasonable* atau logis. Sistem pembuktian jenis ini sering dimaknai dengan sistem pembuktian bebas (*Vrije Bewijstheorie*).<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Munir Fuady, Op.cit., hal 56



Menurut Atang Ranoemiharja, "Alat bukti ialah suatu alat yang berkaitan dengan suatu peristiwa, yang dimana peruntukannya adalah sebagai bahan guna pembuktian dalam memperkuat keyakinan atas benar atau tidak telah terjadi tindak pidana".<sup>39</sup>

Terdapat beberapa jenis alat bukti sah yang berlaku di ketentuan hukum Indonesia. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, antara lain :

Definisi dari keterangan saksi telah dimuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yang menyatakan :

"Keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya itu".<sup>40</sup>

Pada dasarnya, jenis alat bukti yang utama dalam pembuktian perkara pidana adalah keterangan saksi. Jika dilihat dari segi pembuktiannya, keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian, dan perlu diketahui bahwa sebagai seorang saksi, memerlukan beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu<sup>41</sup> :

- 1) "Harus mengucapkan sumpah atau janji;
- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti;
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup;
- 5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri."



b) Keterangan Ahli

Berdasarkan ketentuan Pasal 186 KUHP, "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan". Kemudian menurut M. Yahya Harahap, keterangan ahli dapat diminta dalam 2 tahap, yaitu pada tahap penyidikan dan pada tahap persidangan.<sup>42</sup> Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 133 KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 186 KUHP, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :

1) Diminta pada tahap penyidikan

- a. Penyidik meminta dan diberikan oleh ahli pada tahap penyidikan. Permintaan oleh penyidik ini diberikan secara tertulis dengan menyebutkan tujuan dari pemeriksaan itu.
- b. Berdasarkan permintaan dari penyidik tersebut, ahli yang memeriksa membuat laporan pemeriksaan atau yang disebut *Visum Et Repertum*.
- c. *Visum Et Repertum* dibuat oleh dokter ahli yang memeriksa langsung, atas dasar sumpah jabatan.

2) Diminta dan diberikan di persidangan

Permintaan keterangan ahli pada tahap persidangan diperlukan apabila belum diminta keterangan ahli di penyidikan. Namun bisa juga menghadirkan ahli apabila dianggap perlu didatangkan ke persidangan.

c) Alat Bukti Surat

Ketentuan terkait alat bukti surat telah dimuat dalam Pasal 187 KUHP, yang berbunyi "Surat yang dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah jabatan".<sup>43</sup> Terdapat beberapa kriteria untuk menaksir kekuatan pembuktian dari suatu surat yang digunakan sebagai alat bukti sah, antara lain :

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 300

<sup>43</sup> Nasution, *Op.cit.*, hal 114



1) Ditinjau dari segi formil

Jika ditinjau dari segi formilnya, bentuk dan isi keterangan alat bukti surat hanya dapat dipatahkan oleh alat bukti lainnya.

2) Ditinjau dari segi materiil

Jika ditinjau dari segi materiilnya, kekuatan pembuktian surat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, posisinya setara dengan alat bukti lainnya. “Nilai pembuktiannya menurut pertimbangan hakim dengan berdasarkan beberapa asas proses pemeriksaan perkara pidana, yaitu asas mencari kebenaran materiil (bukan kebenaran formil), asas keyakinan hakim, serta asas batas minimum pembuktian”.

d) Alat Bukti Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, “Alat bukti petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang ada persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain dan apabila perbuatan itu dikaitkan akan memberi gambaran bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan dapat ditentukan pelakunya”.<sup>44</sup>

e) Keterangan Terdakwa

Terdapat ketentuan mengenai keterangan terdakwa yang dimuat dalam Pasal 189 KUHAP, yang menyatakan :<sup>45</sup>

a. “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa sampaikan di persidangan tentang apa yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau ia alami sendiri kejadian tindak pidana”;

b. “Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti jika keterangan terdakwa tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal-hal yang didakwakan kepada yang bersangkutan”;

<sup>44</sup> Suharto RM, **Penuntutan dalam Praktek Peradilan**, cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 154

<sup>45</sup> Pasal 189 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209



c. "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri";

d. "Keterangan terdakwa saja, tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti lain".

## 5. Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, yang dikategorikan sebagai alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 184 KUHP. Alat bukti sendiri merupakan suatu alat untuk menganalisis perihal benarkah telah terbukti terjadinya tindak pidana atau tidak. Alat bukti juga berfungsi guna bahan pertimbangan untuk hakim agar dapat menentukan bersalah atau tidaknya pelaku.

Sedangkan menurut Prof. Andi Hamzah, "barang bukti merupakan suatu barang terkait mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan dengan mana delik dilakukan (alat yang digunakan untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik".<sup>46</sup> Beberapa barang-barang apa saja yang dapat disita telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, yang menyatakan<sup>47</sup>:

- a) "Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana";
- b) "Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya";
- c) "Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana";
- d) "Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana";

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal 254

<sup>47</sup> Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209



- e) "Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan".

Berdasarkan beberapa hal diatas, maka dapat dilihat bahwa perbedaan antara alat bukti dengan barang bukti ialah bahwa alat bukti berperan sebagai sarana untuk membuktikan suatu perbuatan pidana, sedangkan barang bukti ialah alat untuk digunakan dalam suatu perbuatan pidana.

### C. Tinjauan Umum Tindak pidana

Dalam Bahasa Latin, istilah tindak pidana disebut dengan frasa "*delictum*" atau "*delicta*", dan dalam Bahasa Inggris disebut dengan frasa "*delict*". Sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan "*strafbaarfeit*", yang berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakainya istilah *feit* dalam artian meliputi perbuatan dan pengabaian.<sup>48</sup>

Menurut pendapat Pompe, mengemukakan pengertian *strafbaarfeit* sebagai berikut :

- Menurut teori ialah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- Menurut hukum positif ialah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.<sup>49</sup> Simons mengemukakan *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel menyatakan *strafbaarfeit* sebagai kelakuan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Andi Hamzah, **Terminologi Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 48

<sup>49</sup> Bambang Poernomo, **Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hal. 86

<sup>50</sup> Moeljatno, **Azas-azas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal.56



Menurut Moeljatno, *strafbaarfeit* dimaknai sebagai perbuatan pidana. Makna dari perbuatan pidana yang dimaksud oleh Moeljatno adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku dengan disertai ancaman hukuman pidana tertentu, bagi orang yang melanggar aturan tersebut.<sup>51</sup>

Menurut Simons, terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subyektif ialah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>52</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- 1) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis, Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:
  - a. Perbuatan-Yang dilarang (oleh aturan hukum)
  - b. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menunjukkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam faktanya benar-benar dipidana. Pengertian penjatuan pidana merupakan pengertian yang umum, yang berarti pada umumnya dijatuhi pidana. Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana antara lain<sup>53</sup> :

- a. Kelakuan;
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam bukan hukuman;
- d. Dilakukan oleh seseorang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan.

Dapat disimpulkan bahwa kedua jenis unsur-unsur yang telah dikemukakan diatas, sama-sama tidak memisahkan antara perbuatan dengan unsur orangnya.

<sup>51</sup> Bambang Poernomo, Loc. Cit

<sup>52</sup> Ismu Gunadi, dkk, **Hukum Pidana**, Kencana, Jakarta, 2014, hal.40

<sup>53</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana1**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 81



2) Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu<sup>54</sup> :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Objek unsur hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Pandangan monistis memandang suatu tindak pidana harus mencakup sifat dan perbuatan.<sup>55</sup> Sedangkan pandangan dualistis memandang bahwa suatu perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang terpisah.

Perbedaan pandangan diantara kedua aliran tersebut menyebabkan unsur-unsur tindak pidana menurut dua aliran tersebut berbeda. Pandangan monistis menyatakan bahwa unsur tindak pidana antara lain<sup>56</sup> :

- a. Ada perbuatan;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pemaaf.

Sedangkan unsur tindak pidana dari pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 82

<sup>55</sup> Amir Ilyas, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 38

<sup>56</sup> *Ibid*, hal. 43



1. Unsur perbuatan pidana<sup>57</sup> :
  - a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
  - b. Ada sifat melawan hukum
  - c. Tidak ada alasan pemaaf
2. Unsur pertanggungjawaban pidana<sup>58</sup> :
  - a. Mampu bertanggungjawab
  - b. Kesalahan
  - c. Tidak ada alasan pemaaf

#### **D. Tinjauan Umum Pengaturan tentang Satwa Dilindungi**

Ketentuan mengenai perlindungan satwa hingga saat ini telah berkembang dari berbagai pihak, baik nasional ataupun internasional. Dalam lingkup internasional, terdapat "*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)" dan "*International Union for Conservation of Nature* (IUCN)" yang mengeluarkan daftar spesies yang dilindungi dikeluarkan. Sedangkan di Indonesia, daftar spesies yang dilindungi telah diatur melalui regulasi oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa mengatur bahwa, suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib dikategorikan dalam spesies yang dilindungi apabila spesies tersebut mencukupi kriteria, sebagai berikut :

1. Memiliki populasi yang minim;
2. Terdapat penurunan yang cukup drastis pada jumlahnya;
3. Memiliki daerah persebaran yang terbatas.

Tujuan dari adanya penggolongan ini, antara lain :

1. Agar spesies tumbuhan dan satwa terhindarkan dari potensi kepunahan;
2. Untuk menjaga keaslian genetiknya dan keanekaragaman dari spesiesnya;

<sup>57</sup> I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 57

<sup>58</sup> *Ibid.*



### 3. Dapat memberikan keseimbangan pada ekosistem yang ada.

Perlindungan satwa di Indonesia sampai saat ini masihlah tergolong lemah. Hal itu dapat terlihat dari kepedulian dan upaya masyarakat terhadap perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati, yang hanya muncul ketika sudah terlanjur terjadi saja. Permasalahan yang khususnya terjadi pada perlindungan satwa dilindungi, yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati masih belum mendapat perhatian yang cukup dari para akademisi dan praktisi hukum, dan tidak diprioritaskan atau setidaknya setara dengan permasalahan dalam hukum konvensional.

Banyak dari akademisi dan praktisi hukum yang masih beranggapan bahwa tindak pidana terhadap satwa dilindungi tersebut tidak terlalu penting karena tidak mengancam atau merugikan manusia secara langsung. Oleh karena itu, banyak sekali kasus tindak pidana, khususnya pembunuhan terhadap satwa dilindungi yang tidak diusut dengan tuntas. Maka dari itu, diperlukan kerjasama yang baik antara penyidik dengan ahli yang berkompeten di bidangnya, yakni dokter hewan forensik guna menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi.

Terhadap satwa yang dilindungi, telah diatur beberapa peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Pengaturan terkait tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi sendiri diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan :

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang **Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419



Dalam pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga telah diatur mengenai ketentuan pidana terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi, yang menyatakan<sup>60</sup> :

"Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

"Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 33 Ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".

Selanjutnya dalam Pasal 302 KUHP terdapat juga pengaturan mengenai tindak pidana terhadap satwa yang menyatakan<sup>61</sup> :

1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan :

ke-1 Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

ke-2 Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya";

2) "Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan";

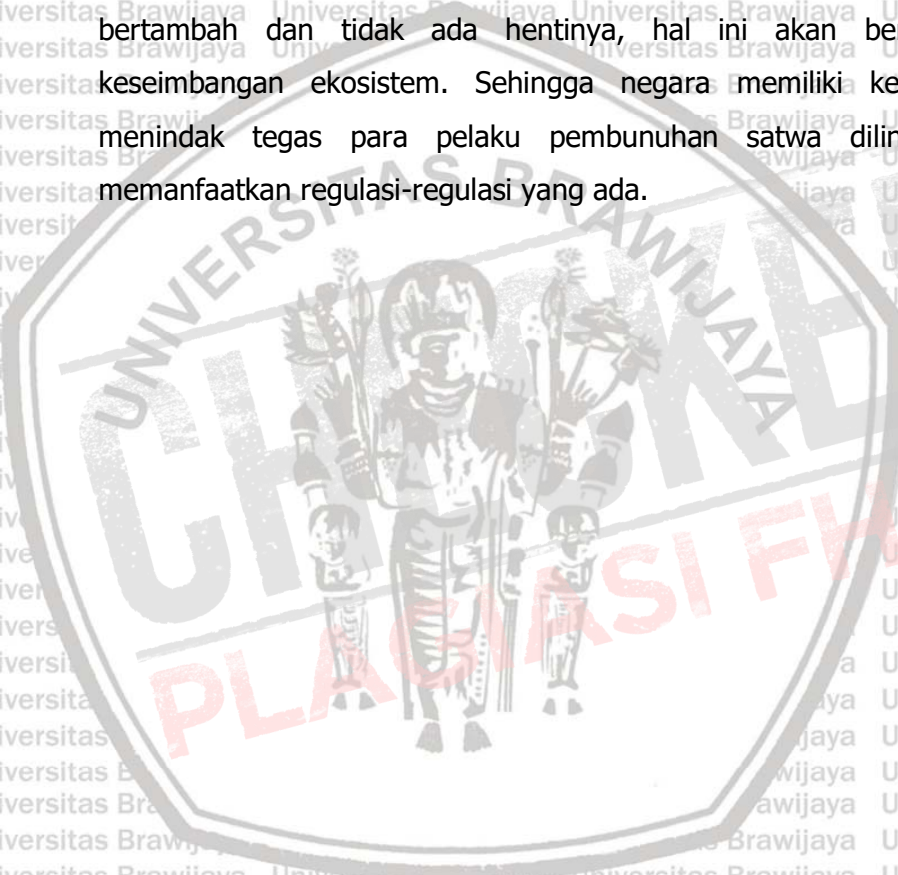
<sup>60</sup> *Ibid.*,

<sup>61</sup> Pasal 302 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang **Peraturan Hukum Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660



- 3) "Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas";
- 4) "Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana".

Tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut mencakup pembunuhan satwa yang merupakan kegiatan dengan tujuan memperoleh satwa yang dilindungi negara dalam keadaan mati lalu dieksploitasi dengan tidak bertanggungjawab dan melalui cara yang melawan hukum. Apabila pembunuhan terhadap satwa dilindungi semakin bertambah dan tidak ada hentinya, hal ini akan berdampak pada keseimbangan ekosistem. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk menindak tegas para pelaku pembunuhan satwa dilindungi dengan memanfaatkan regulasi-regulasi yang ada.



PLAGIASI FHUB



### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Urgensi *Visum Et Repertum Veteriner* Sebagai Alat Bukti Tindakan Pidana Terhadap Satwa yang Dilindungi

Sebagai salah satu negara dengan julukan negara *mega biodiversity*, Indonesia tentunya memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mempertahankan dan melestarikan keanekaragaman hayati, yang salah satunya adalah satwa yang dilindungi. Dalam hal ini, kehadiran satwa diantara populasi manusia dapat memberikan keseimbangan ekosistem. Namun, sampai saat ini pun kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melindungi satwa sangatlah rendah. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari hilangnya atau menurunnya keanekaragaman hayati, dapat membuat terganggunya keseimbangan sistem kehidupan dan keberlangsungan kehidupan manusia.

"Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian satwa atau binatang; -- buru satwa liar yang menurut undang-undang atau peraturan telah ditetapkan untuk dapat diburu; -- langka binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi (seperti jalak putih, cenderawasih); --liar semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia; -- migran satwa yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu".<sup>62</sup>

Sedangkan satwa yang dilindungi merupakan segala jenis spesies satwa yang jumlah populasinya sangat rendah dan diikuti dengan tingkat perkembangan yang lambat. "Satwa langka ini tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu, serta diperdagangkan, karena guna menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan".<sup>63</sup>

Berbagai bentuk tindakan manusia yang mengancam keberlangsungan hidup satwa tentunya berdampak pada penurunan populasi dari satwa

<sup>62</sup> <http://kbbi.web.id/satwa> (diakses pada tanggal 15 Februari 2021, pukul 09.36)

<sup>63</sup> Wiratno, dkk, **Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional**, The Gibon Foundation, Jakarta, 2001, hal 106



tersebut. Dan jika hal ini terjadi pada satwa yang dilindungi, maka pastinya mengakibatkan populasi satwa tersebut menjadi punah.

Beberapa bentuk tindakan manusia yang termasuk dalam tindak pidana terhadap satwa dilindungi diantaranya :

1. Perburuan atau penangkapan satwa secara *illegal*

Salah satu perbuatan manusia yang sangat mempengaruhi penurunan populasi satwa dilindungi adalah perburuan liar.<sup>64</sup> Perburuan dan penangkapan satwa dilindungi ini tentunya hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu semata. Tujuan utamanya adalah satwa-satwa dilindungi yang sudah langka populasinya, dan juga satwa yang memiliki ciri khas tersendiri. Karena satwa yang dilindungi dan memiliki ciri khas sendiri tentunya sangat laku diperjualbelikan dengan harga jual tinggi.

2. Memporniagakan satwa

Memporniagakan satwa dilindungi merupakan salah satu kegiatan manusia yang banyak diminati. Tentunya hal ini dikarenakan tingginya harga jual dari satwa dilindungi tersebut. Dan ini lah yang menjadi salah satu faktor pendorong bagi pelaku untuk mendapatkan satwa dilindungi tersebut. Selain itu, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, perdagangan satwa dilindungi secara *illegal* pun bisa melalui media online. Sehingga semakin mempermudah pelaku dan meminimalisir resiko dari penegak hukum bagi penjual dan pembeli.<sup>65</sup>

3. Memanfaatkan organ atau anggota tubuh satwa secara *illegal*

Perburuan dan penangkapan satwa dilindungi merujuk pada kegiatan jual beli satwa secara *illegal*, dan kegiatan perniagaan ini tentunya merujuk juga pada objeknya yaitu organ atau bagian tubuh dari satwa dilindungi. Maraknya hal-hal yang telah disebutkan diatas disebabkan karena tingginya permintaan pasar terhadap organ-organ atau anggota tubuh satwa dilindungi untuk kepentingan kegemaran

<sup>64</sup> <https://www.profauna.net/id/perdagangan-satwaliar/2012/catatan-profauna-indonesia-tahun-2012-perdagangan-satwa-langka-secara-online-semakinmarak#.Wu86ivW-m00> (diakses pada tanggal 15 Februari 2021, pukul 10.13)

<sup>65</sup> Penjelasan Chairul Saleh, Conservation Science for Flagship Species Coordinator WWF-Indonesia, 2012, <https://www.wwf.or.id/?26740/Menyelamatkan-yangTersisa-dari-Perdagangan-Illegal-Satwa-Liar> (diakses pada tanggal 15 Februari 2021, pukul 10.41)



koleksi, sebagai obat alami untuk kesehatan, hiasan atau pajangan, bahkan sebagai bahan makanan untuk dikonsumsi. Namun terlepas dari itu semua, tentunya tindakan memanfaatkan organ dan anggota tubuh satwa dilindungi secara *illega*/secara tegas telah dilarang oleh hukum.

Jika dilihat dari banyaknya kasus tindak pidana terhadap satwa dilindungi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya:

a) Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait satwa yang dilindungi oleh

Undang-Undang

Ketidaktahuan masyarakat terkait satwa-satwa mana saja yang dilindungi oleh Undang-Undang menjadi faktor utama dari banyaknya jumlah tindak pidana terhadap satwa dilindungi, khususnya pembunuhan satwa. Seringkali pelaku yang berhasil ditangkap, menyatakan bahwa ia tidak mengetahui bahwa satwa yang ia bunuh terkategori dalam satwa yang dilindungi.

b) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan satwa

Ketidakpedulian masyarakat jika melihat peristiwa tindak pidana terhadap satwa juga merupakan salah satu faktor terus terjadinya pembunuhan satwa. Sifat masyarakat yang cuek membuat pelaku leluasa dalam melakukan aksinya karena menganggap tidak ada teguran sehingga pelaku tidak takut ataupun jera.

c) Faktor ekonomi

Semakin sedikit populasi suatu satwa dan semakin uniknya anggota tubuh satwa, membuat penawaran harga jual satwa tersebut di pasaran semakin tinggi. Dengan fakta tingginya harga penjualan satwa dilindungi, tentunya memicu banyaknya individu dengan ekonomi rendah yang memanfaatkan hal ini sebagai mata pencaharian. Besarnya potensi keuntungan yang didapatkan mendorong semakin meningkatnya aktifitas kejahatan terhadap satwa ini.

Beberapa faktor yang telah disebutkan diatas tentunya merupakan sebuah hal yang berpotensi serius mengancam kelangsungan hidup dan kelestarian satwa dilindungi. Maka dari itu perlu ketegasan penegakan hukum agar membuat pelaku jera dan guna mencapai keadilan bersama.



Menurut Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, terdapat setidaknya 236 satwa dilindungi, yang terbagi sebagai berikut :

1) Mamalia (Menyusui)

Jenis-jenis mamalia yang diatur dalam ketentuan ini diantaranya :

“anoa dataran rendah, anoa pegunungan, binturong, pulusan, babi rusa, paus biru, paus bersirip, banteng, kambing sumatera, rusa bawean, menjangan, paus, ajag, kubung/walangkekes, musang air, monyet hitam Sulawesi, kanguru pohon, badak sumatera, lumba-lumba air laut (*Dolphinidae*), duyung, gajah, kucing merah, kucing hutan, kuwuk, kucing dampak, kucing emas, kucing bakau, beruang madu, owa/kera tak berbuntut, landak, bajing terbang ekor merah, bajing tanah bergaris, bajing tanah, lutra, lutra sumatera, monyet sulawesi, bokoi, monyet jambul, musang sulawesi, trenggiling, paus bongkok, kidang, sigung, bekantan, harimau dahan, kelinci sumatera, malu-malu, lumba-lumba air tawar, macan tutul, harimau jawa, harimau sumatera, cukbo/bajing terbang, kuskus, orang utan, lutung dahi putih, lutung merah, surili, joja/lutung mentawai, rangka, musang congkok, landak irian, jelarang, badak jawa, simpei mentawai, tapir, singapuar, kanguru tanah, kancil, dan lumba-lumba air laut (*Ziphiidae*)”<sup>66</sup>

2) Aves (Burung)

Jenis burung yang diatur dalam ketentuan ini diantaranya : “elang, jantingan gunung, burung madu sangihe, burung udang, brencet wergan, pecuk ular, mandar sulawesi, kuau, bangau putih, julang, kakatua putih besar jambul kuning, kakatua gofin, kakatua seram, kakatua kecil jambul kuning, itik liar, burung mas, kasuari kecil, kasuari, kasuari gelambir satu, bangau hitam, burung sohabe coklat, burung matahari, pergam raja, kuntul karang, alap-alap putih, nuri sangir, bebek laut, seriwang sangihe, burung gunting, burung kuda, burung dara mahkota, beo flores, beo nias, beo Sumbawa, jenjang, trulek lidi, bluwok, bluwok berwarna, bayan, marabu, jalak bali, blekek asia,

<sup>66</sup> Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang **Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14



burung kacamata leher abu-abu, beleang ekor putih, serindit sangihe, serindit sulawesi, nori merah kepala hitam, burung maleo, cangcarang, haruku, tulang tempuk, maleo, burung gosong, burung sesap, burung kipas biru, bangau putih susu, jantingan, gagajahan, kowak merah, burung hantu biak, burung alap-alap, burung cendrawasih, burung merak, gangsa laut, burung paok, ibis hitam, dan merak kerdil”<sup>67</sup>

### 3) *Reptilia* (Hewan melata)

Jenis hewan melata yang diatur dalam ketentuan ini diantaranya : “tuntong, penyu tempayan, kura-kura irian, kura irian leher panjang, penyu hijau, labi-labi besar, soa payung, sanca hijau, buaya air tawar irian, buaya muara, buaya siam, penyu belimbing, kura irian leher pendek, penyu sisik, bunglon sisir, biawak pohon, penyu ridel, penyu pipih, kura-kura gading, sanca bodo, sanca timor, kadal panan, buaya sapit, biawak Kalimantan, biawak coklat, biawak Maluku, biawak komodo, biawak abu-abu, biawak hijau, biawak timor, dan biawak togian”<sup>68</sup>

### 4) *Insecta* (Serangga)

Jenis serangga yang diatur dalam ketentuan ini diantaranya : “kupu bidadari, kupu sayap burung peri, kupu sayap burung goliat, kupu sayap burung surge, kupu sayap priamus, kupu burung rotsil, kupu burung titon, kupu trogon, dan berbagai macam kupu raja”<sup>69</sup>

### 5) *Pisces* (Ikan)

Jenis ikan yang diatur dalam ketentuan ini diantaranya : “selusur maninjau, ikan raja laut, belida jawa, pari sentani, wader goa, peyang Malaya, dan arowana irian”<sup>70</sup>

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> *Ibid.*,

<sup>70</sup> *Ibid.*,



6) *Anthozoa* (Hewan tidak bertulang belakang)

Jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang dalam ketentuan ini diantaranya : “akar bahan, ketam kelapa, kepala kambing, triton terompet, kima kuku beruang, kima cina, nautilus berongga, ketam tapak kuda, kuma kunai, kima selatan, kima raksasa, kima kecil, kima sisik, troka, dan batu laga”<sup>71</sup>

Berdasarkan berbagai macam satwa yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa pada “Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, setidaknya terdapat 70 jenis mamalia (hewan menyusui), 70 jenis *aves* (burung), 54 jenis *reptilia* (hewan melata), 20 jenis *insecta* (serangga), 7 jenis *pisces* (ikan), serta 15 jenis *anthozoa* (hewan tak bertulang belakang)”.

Berbagai macam satwa tersebut dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi karena merujuk pada kategori kepunahan, sebagaimana berikut<sup>72</sup>:

- 1) “Nyaris punah, dimana tingkat populasinya kritis dan habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis”;
- 2) “Menuju kepunahan, dimana jumlah populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya”;
- 3) “Jarang, dimana populasinya sudah berkurang secara bertahap”.

Kepunahan dari satwa dilindungi ini dapat berkurang apabila terdapat kesadaran untuk melindungi dan melestarikan satwa, serta dengan mencegah kerusakan lingkungan yang merupakan habitat satwa. Karena dapat diketahui bahwa sebagai salah satu subyek hukum, satwa berhak memiliki kehidupan selayaknya manusia yang mempunyai hak hidup dan mendapat kesejahteraan. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, yang menyatakan :

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Satwa**, Erlangga, Jakarta, 1995, hal 94



"Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia".<sup>73</sup>

Disamping itu terdapat pula ketentuan mengenai perlindungan satwa dilindungi sebagaimana termuat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan<sup>74</sup> :

(2) Setiap orang dilarang untuk :

- a. "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";
- b. "menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati";
- c. "mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia";
- d. "memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia";
- e. "mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi".

Selanjutnya terdapat ketentuan yang mengatur sanksi pidana untuk setiap orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang disebutkan diatas, sanksi pidana tersebut tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan<sup>75</sup> :

<sup>73</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang **Otoritas Veteriner**, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6019

<sup>74</sup> Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang **Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419

<sup>75</sup> *Ibid*,



- 1) "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)";
- 2) "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";
- 3) "Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";
- 4) "Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)";
- 5) "Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran".

Selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, KUHP sebagai dasar peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, juga telah mengatur dengan tegas terkait perbuatan yang dapat merugikan keberlangsungan hidup satwa, yaitu pada Pasal 302 KUHP, yang menyatakan :

- (1) "Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
  1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan



yang wajib dipeliharanya”.

- (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan”.

Sangat jelasnya pengaturan perlindungan hukum bagi satwa dilindungi bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai perbuatan apa saja yang dilarang oleh hukum. Namun jika dilihat hingga saat ini pun masih marak ditemui perburuan dan pembunuhan satwa yang dilindungi.

Pembunuhan terhadap satwa dilindungi tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, faktor yang membuat masih terulangnya tindak pidana yang sama adalah fakta bahwa tindak pidana terhadap satwa kurang mendapat perhatian baik dari pihak pemerintah, penegak hukum ataupun masyarakat, karena diasumsikan bahwa tindak pidana terhadap hewan tidaklah membahayakan manusia, sehingga memicu ketidakpedulian terhadap tindak pidana terhadap hewan.

Selain itu, terdapat faktor dari segi penegakan hukum terhadap pelaku. Sulitnya bukti yang diperoleh penyidik membuat semakin rendah peluang tertangkapnya pelaku, sehingga hal ini membuat kejadian yang sama terus terjadi lagi.

Terkait tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa, pastinya penyidik akan sangat kesulitan jika menanganinya sendiri. Maka dari itu diperlukan bantuan dari ahli, yang dalam hal ini berasal dari ilmu forensik. Dalam perkembangannya, ilmu kedokteran forensik meluas ke dalam beberapa sub-bidang yang diantaranya : komputer forensik, psikologi forensik, kedokteran forensik, kimia forensik, entomologi forensik, toksikologi forensik, botani forensik, mikrobiologi forensik, molekuler forensik, dan veterineri forensik.

Dalam hal ini maka dapat diketahui bahwa kesediaan dokter forensik tidak hanya untuk manusia, tetapi terdapat juga dokter forensik hewan yang memiliki tugas dan wewenang yang setidaknya sama dengan dokter forensik biasa.



Bantuan dari dokter forensik hewan ini berupa laporan *Visum Et Repertum* berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter forensik yang bersangkutan. *Visum Et Repertum* sendiri telah disebutkan dalam *Staatsblaad* 350 tahun 1937 Pasal 1 dan 2 yang menyatakan<sup>76</sup> :

- 1) "Visa reperta dari dokter-dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah daya bukti dalam perkara-perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa";
- 2) "Dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, boleh mengikrarkan sumpah (atau janji)".

*Visum Et Repertum* (yang selanjutnya akan ditulis *VeR*) sendiri merupakan suatu keterangan dalam bentuk tertulis dan dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik, atas dasar permintaan dari penyidik yang berwenang memintanya terkait hasil pemeriksaan secara medis terhadap manusia maupun hewan dalam kondisi hidup ataupun mati, berdasarkan keahliannya dan dibawah sumpah, untuk kepentingan keadilan. Dalam hal terkait korban hewan biasanya disebut dengan *Visum Et Repertum Veteriner* (yang selanjutnya akan ditulis *VeR Veteriner*), namun dalam ketentuan pengaturan dan konsep pelaksanaannya sama dengan *VeR* terhadap korban manusia.

*VeR Veteriner* dalam hal ini memiliki peran dalam suatu pembuktian dalam hal menentukan terkait adanya suatu tindak pidana atau tidak, mengarahkan jalannya penyidikan, membantu dalam menentukan jenis penuntutan, dan juga memberikan keyakinan pada hakim atas bukti fisik yang ada melalui pemeriksaan ahli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dokter hewan forensik, yakni drh. Firda Nur, M.Vet, kehadiran *VeR Veteriner* dapat dikatakan sebagai sarana utama dalam proses penyidikan perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa hewan. Laporan *VeR Veteriner* ini akan sangat membantu penyidik dalam mengidentifikasi spesies satwa, mengetahui waktu/saat

<sup>76</sup> *Staatsblaad* 350 tahun 1937



kematian, mengetahui tempat kejadian perkara, mengetahui *Cause of Death* (penyebab kematian), mengetahui alat bantu yang digunakan, serta mengidentifikasi perbedaan antara kematian oleh manusia atau non-manusia (seperti pemangsaan/kecelakaan). Bahkan berdasarkan keakuratan dari pemeriksaan medis terhadap satwa tersebut, dapat juga memudahkan penyidik dalam mengidentifikasi bukti yang mungkin menghubungkan dengan suatu tersangka tertentu.<sup>77</sup>

“Berdasarkan perkembangannya, pembuktian fisik secara ilmiah dan pengujian bukti haruslah digunakan untuk penyidikan suatu tindak pidana”.<sup>78</sup> Maka dari itu, menemukan kebenaran materiil sangatlah penting guna upaya tercapainya tujuan dari proses peradilan hukum acara pidana. “Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01.PW.07.03 tahun 1983 yang menyatakan untuk mencari dan mendapatkan setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran selengkap mungkin dari suatu perkara pidana dengan ketentuan hukum acara pidana sebenar-benarnya guna mencari pelaku, dan kemudian meminta dilakukannya pemeriksaan peradilan untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu perbuatan pidana dan siapakah yang bertanggungjawabkannya”.<sup>79</sup>

Dalam upaya menemukan suatu kebenaran obyektif, tentunya diperlukan adanya alat bukti. “Alat bukti ialah segala hal mengenai suatu perbuatan, alat-alat bukti, dan apakah dapat digunakan untuk bahan pembuktian agar dapat memperkuat keyakinan hakim suatu perbuatan pidana oleh terdakwa”.<sup>80</sup> Pembuktian dilaksanakan dengan memberikan alat bukti sah ke persidangan. Guna mendekati kebenaran materiil, dalam pembuktian yang berkaitan dengan bukti fisik harus dilaksanakan proses pembuktian secara ilmiah.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Dokter Hewan Forensik, drh. Firna Nur, M.Vet, tanggal 11 Januari 2021

<sup>78</sup> Ahmad Yudianto, **Ilmu Kedokteran Forensik**, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hal 2

<sup>79</sup> Ibid., hal 3

<sup>80</sup> Alfitra, **Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia**, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal 23



Berdasarkan Pasal 183 KUHP, terdapat ketentuan yang menyatakan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"<sup>81</sup>

Ketentuan tersebut berperan untuk membuktikan kebenaran, keadilan, serta kepastian hukum bagi setiap orang. Syarat untuk dapat dijatuhi hukuman, antara lain :

- a) "Alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*)"
- b) Keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*)"

Kedua syarat tersebut saling berhubungan satu sama lain sebagaimana mestinya. Diperlukan adanya keyakinan dari hakim yang cukup kuat yang diperoleh dari satu alat bukti saja.

Alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, antara lain :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.<sup>82</sup>

"Keterangan saksi sebagaimana dimuat pada Pasal 168, 170, 171, dan 185 KUHP. Kemudian Keterangan ahli seperti yang dimuat di Pasal 186 KUHP. Selanjutnya terkait alat bukti surat telah dimuat di Pasal 187 KUHP. Alat bukti selanjutnya yakni petunjuk dan keterangan terdakwa yang masing-masing dimuat dalam Pasal 188 dan 189 KUHP".

Sebenarnya dalam ilmu kedokteran kehakiman, terdapat bukti-bukti selain saksi hidup, yaitu bukti mati yang berguna untuk dapat mengetahui kaitan yang terjalin antara bukti mati dengan suatu perbuatan pidana yang terjadi. Dalam menganalisis secara mendalam mengenai bukti-bukti mati

<sup>81</sup> Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

<sup>82</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 259







untuk penentuan pasal yang akan didakwakannya. Kemudian tentunya berperan pula untuk memberikan keyakinan pada hakim atas suatu kenyataan dari bukti fisik dalam korban hewan tersebut.

Apabila dilihat dari berbagai peran dan juga begitu pentingnya laporan pemeriksaan *VeR Veteriner* ini, dapat diketahui bahwa keberadaannya dapat memperkuat penegakan hukum terkait tindak pidana terhadap satwa. Namun kenyataan bahwa masih banyak yang merasa awam dengan keberadaan *VeR Veteriner*, maka diperlukan adanya pengakuan terhadap perkembangan ilmu yang dapat digunakan sebagai metode penegakan hukum. Pengakuan atas perkembangan ilmu forensik veteriner tersebut dapat dituangkan dalam suatu penormaan. Hal ini bertujuan agar para penegak hukum dapat mengetahui dengan jelas terkait penggunaan *VeR Veteriner* serta prosedurnya, dan juga dapat memiliki kekuatan mengikat sebagai alat bukti. Sehingga penegakan hukum terkait tindak pidana terhadap satwa dilindungi pun tak akan mengalami kesulitan lagi dan juga tentunya dengan penegakan hukum yang tegas, juga akan mengurangi kejahatan-kejahatan terhadap satwa dilindungi tersebut.

#### **B. Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum Veteriner* Sebagai Alat Bukti Tindak pidana Terhadap Satwa yang Dilindungi**

Problematika tindak pidana di era saat ini semakin kompleks, terlebih disertai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tentunya harus memberikan dampak juga terhadap perkembangan penegakan hukum di Indonesia.

Banyak orang beranggapan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang hanya berhubungan dengan manusia, merugikan manusia, dan korbannya manusia. Namun disamping itu, perlu juga disadari bahwa terdapat makhluk hidup lain seperti satwa yang dapat menjadi korban dari kejahatan.

Tentunya telah ada ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap satwa, namun jika dilihat faktanya tindak pidana terhadap satwa sangat kurang mendapat perhatian baik dari masyarakat atau bahkan dari



segi penegakan hukumnya. Hal ini tentunya dikarenakan adanya asumsi bahwa tindak pidana terhadap satwa dianggap tidak merugikan manusia, dan bukanlah hal yang menjadi kekhawatiran bersama. Padahal nyatanya keberadaan satwa dapat menimbulkan keseimbangan ekosistem, dan juga dengan melestarikan satwa dapat mengurangi kepunahan dari satwa tersebut.

Indonesia sendiri memiliki predikat sebagai negara *mega biodiversity*, dengan tingkat keanekaragaman hayati dan endemisme atau keunikan yang tinggi. "Bahkan menurut catatan terakhir pada tahun 2014, diperkirakan terdapat sekitar 720 spesies mamalia, 1599 spesies burung, 385 spesies amfibi, 723 spesies reptile dan berbagai jenis lainnya yang dimiliki oleh Indonesia".<sup>84</sup> Dengan memiliki keanekaragaman hayati yang begitu tinggi bahkan mendapat predikat seperti itu tentunya merupakan kebanggaan bagi Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa dengan adanya hal itu juga memberikan tanggungjawab yang sangat besar untuk melindungi dan melestarikannya.

Permasalahan yang sering terjadi sampai saat ini adalah maraknya tindak pidana terhadap satwa, baik berupa penganiayaan, perdagangan, bahkan pembunuhan satwa. Tindakan-tindakan tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup dari satwa bahkan memutus rantai perkembangbiakan satwa tersebut, sehingga menimbulkan dampak langsung terhadap penurunan populasinya atau bahkan kepunahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tumbuhan dan satwa dikategorikan menjadi tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

"Jenis tumbuhan dan satwa dalam kategori dilindungi adalah yang dalam bahaya kepunahan, sedangkan jenis tumbuhan dan satwa dalam kategori tidak dilindungi adalah yang populasinya jarang-jarang".<sup>85</sup>

Terdapat beberapa regulasi yang didalamnya memuat ketentuan tentang perlindungan terhadap satwa dilindungi, yang diantaranya termuat

<sup>84</sup> Hariyawan, *loc.cit.*

<sup>85</sup> Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang **Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419



dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan pengaturan sanksinya yang diatur di Pasal 40 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu, di dalam KUHP sebagai dasar perundang-undangan hukum pidana di Indonesia juga telah memuat ketentuan terkait perlindungan satwa yang terdapat di Pasal 302 KUHP, yang didalamnya mengatur mengenai penganiayaan hewan ringan dan penganiayaan hewan berat.

Dengan berbagai macam regulasi yang jelas terkait perlindungan hukum bagi satwa yang dilindungi, tentunya diharapkan dapat memberikan pengertian pada masyarakat terkait perbuatan-perbuatan atau bentuk pengeksploitasian terhadap satwa dilindungi yang dilarang oleh perundang-undangan. Dan juga diharapkan ketentuan yang memuat sanksi yang dinyatakan dalam Pasal 40 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berfungsi sebagai tekanan psikologis bagi pelaku<sup>86</sup>.

Namun, faktanya sampai sekarang masih saja banyak ditemui tindak pidana terhadap satwa dilindungi. Segala bentuk tindak eksploitasi dai keunikan satwa dilindungi menjadi faktor utama diburunya satwa-satwa ini. Penawaran harga yang tinggi terhadap satwa dilindungi ini juga mendorong perdagangan satwa dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan perlindungan satwa yang tertuang dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan beberapa pengaturan lainnya yang sebelumnya telah disebutkan dapat dikatakan belum efektif dalam pelaksanaan penegakan hukumnya.

Diperjelas juga dengan banyaknya kasus dari tindak pidana terhadap satwa dilindungi, yang terpaksa terhenti dan tidak dilanjutkan karena kurangnya bukti yang diperoleh penyidik. Sebagai contoh terdapat kasus perburuan sekitar 11 ekor trenggiling (*Manis Javanica*) dan 21 ekor landak

<sup>86</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hal 165



(*Hystrix Brachyura*) di wilayah Gunung Kawi, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penyidik Polres Malang dan BKSDA mengetahui hal itu karena menemukan beberapa anggota tubuh dari satwa-satwa tersebut pada saat melakukan patroli rutin.<sup>87</sup> Kasus ini tidak dapat dilanjutkan karena minimnya bukti yang diperoleh oleh penyidik dan tidak adanya saksi, sehingga tidak dapat mengerucutkan pada kemungkinan pelakunya.

Selain itu ada juga kasus serupa yang baru saja terjadi pada tanggal 9 Agustus 2020 di hutan lindung Dusun Perinci, Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Masyarakat setempat menemukan kepala dan kulit dari satwa Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) yang tergantung di dahan pohon. Kemudian masyarakat melaporkannya pada Tim ProFauna Indonesia disertai dengan mengirimkan foto dari kepala dan kulit lutung jawa tersebut. Namun di tanggal 11 Agustus 2020, ketika tim gabungan ProFauna Indonesia bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (untuk selanjutnya ditulis BBKSDA) Jawa Timur, Perhutani, dan Penyidik Polres Malang melakukan olah tempat kejadian perkara, mereka hanya menemukan sisa jari dari tangan lutung jawa dan beberapa sisa helai rambut yang terikat di dahan pohon tersebut. Saat dilakukan penyidikan oleh Polres Malang dan BBKSDA, hasilnya sempat merujuk pada seseorang yang diduga sebagai pelaku pembantaian terhadap lutung jawa tersebut. Namun, dikarenakan kurangnya bukti, penyidik Polres Malang kesulitan untuk melanjutkan perkara ini<sup>88</sup>.

Dari kedua kasus tindak pidana terhadap satwa dilindungi yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang membuat penyidik kesulitan untuk menentukan pelakunya adalah kurangnya bukti. Pada dasarnya, pembuktian memiliki peran yang penting dalam proses hukum acara pidana. Terwujudnya kebenaran materiil merupakan tujuan dari hukum acara pidana yang tentunya dalam pelaksanaannya dibutuhkan keaktifan dari hakim. Jika dilihat pada pelaksanaannya, tentunya hal ini berbeda dengan hukum acara perdata yang bertujuan mewujudkan kebenaran formil, sehingga hakimnya bersifat pasif.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Unit 2 Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Malang, Brigadir Irwan, tanggal 17 November 2020

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Unit 2 Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Malang, Brigadir Irwan, tanggal 17 November 2020



Menurut Van Bemmelen, hukum acara pidana memiliki tiga fungsi, yaitu<sup>89</sup> :

- 1) Mencari dan menemukan kebenaran materiil;
- 2) Pemberian keputusan oleh hakim;
- 3) Pelaksanaan keputusan hakim.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur mengenai ketentuan untuk mencari kebenaran materiil oleh aparat penegak hukum, yang menyatakan :

“Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.<sup>90</sup>

Bersalah atau tidaknya pelaku dapat ditentukan melalui proses pembuktiannya. Kebenaran terkait suatu kejahatan atau tindak pidana dapat ditemukan juga melalui pembuktian ini. “Berdasarkan teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, hakim dapat memberikan putusan bersalah kepada seseorang dengan berdasar atas aturan pembuktian yang ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan”.<sup>91</sup> Dengan merujuk pada hal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya pembuktian haruslah dilaksanakan berdasarkan alat bukti sah Undang-Undang”.<sup>92</sup>

Pandangan diatas semakin diperkuat dengan isi ketentuan dari Pasal 183 KUHP, yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>93</sup>

<sup>89</sup> Andi Hamzah, **Hukum dan Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 9

<sup>90</sup> Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang **Kekuasaan Kehakiman**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

<sup>91</sup> Syaiful Bakhri, **Beban Pembuktian**, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal 53

<sup>92</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, **Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana**, Sinar Wijaya, Surabaya, 1996, hal 17

<sup>93</sup> Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209



Ketentuan terkait alat-alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan :

- (1) Bukti yang sah adalah :
1. keterangan saksi
  2. keterangan ahli
  3. surat
  4. petunjuk
  5. Keterangan terdakwa<sup>94</sup>

Yang dimaksud Keterangan Ahli berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah *"Suatu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki suatu keahlian khusus untuk membuat jelas suatu perkara pidana"*. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 120 KUHAP, yang menegaskan bahwa keterangan ahli berasal dari keterangan yang dikeluarkan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus berdasar atas keilmuannya.

Sedangkan yang dimaksud alat bukti Surat berdasarkan Pasal 187 KUHAP adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan. "Jenis surat yang dimaksud adalah berita acara atau bentuk surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas".<sup>95</sup>

Dalam proses penyidikan terhadap pembunuhan satwa yang dilindungi tentunya akan sangat sulit apabila penyidik melakukan tugasnya sendiri. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan penyidik terhadap beberapa hal lain. Maka dari itu diperlukan seorang ahli untuk dapat membantu penyidik dalam mengumpulkan bukti. Dalam hal ini dinyatakan pada pasal 120 ayat (1) KUHAP yang memuat bahwa jika diperlukan, penyidik berwenang meminta pendapat ahli.<sup>96</sup>

Seorang ahli yang dapat membantu dalam perkara yang menyangkut dengan tubuh dan nyawa adalah ahli dokter forensik. Dengan bantuan dokter forensik, tentunya dapat mempermudah dalam pengungkapan suatu perkara. Kewenangan penyidik untuk mendapatkan bantuan ahli dimuat di Pasal 133 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan :

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Eddy O.S. Hiariej, **Teori Hukum dan Pembuktian**, Erlangga, Jakarta, 2012, hal 108

<sup>96</sup> *Ibid.*



"Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman dan dokter ahli lainnya".<sup>97</sup>

Bantuan dari ahli dokter forensik terkait perkara ini dituangkan melalui laporan hasil pemeriksaan medis atau *VeR*. Tidak banyak yang mengetahui bahwa *VeR* tidak hanya berlaku untuk pemeriksaan pada manusia, namun juga berlaku untuk pemeriksaan terhadap hewan. Pemeriksaan medis yang dilakukan terhadap hewan menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa dilakukan oleh dokter hewan forensik. Tugas dan wewenang dari dokter forensik hewan tidak jauh berbeda dengan dokter forensik biasa. Keduanya sama-sama dapat membuat laporan *VeR* atas hasil pemeriksaan. Namun bedanya, jika dalam konsep pemeriksaan hewan, disebut sebagai *Veteriner* sehingga menjadi *VeR Veteriner*.

Yang berwenang untuk meminta laporan hasil pemeriksaan *VeR Veteriner*, antara lain :

1. Penyidik

"Penyidik yang dimaksud ialah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP".<sup>98</sup> Selain itu terkait tindak pidana terhadap satwa, Penyidik PNS juga memiliki wewenang untuk meminta laporan *VeR Veteriner* sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Hakim pidana

Hakim pidana dalam hal ini biasanya akan meminta laporan *VeR Veteriner* secara langsung kepada dokter. Namun, hakim dapat juga memberikan perintah kepada jaksa untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan *VeR Veteriner*.<sup>99</sup> Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 180 Ayat

<sup>97</sup> *Ibid.*,

<sup>98</sup> Ahmad Yudianto, Op.cit, hal 11

<sup>99</sup> *Ibid.*,



(1) KUHAP.

3. Hakim perdata

Hakim perdata memiliki wewenang untuk meminta laporan *VeR Veteriner* secara langsung kepada dokter, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglemen* (HIR).

4. Hakim agama

Hakim agama juga berhak untuk meminta *VeR Veteriner* secara langsung kepada dokter, sebagaimana ketentuan di Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Disamping itu, yang memiliki wewenang untuk membuat *VeR Veteriner* menurut Pasal 133 Ayat (1), antara lain Ahli Kedokteran Kehakiman dan dokter ahli lainnya yang dalam hal ini adalah dokter hewan forensik. Kewenangan dokter hewan forensik dalam membuat *VeR Veteriner* dipertegas dengan ketentuan dalam Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.

Seorang dokter juga memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan ahli untuk kepentingan peradilan terkait kasus tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa, seperti yang diatur dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan: "Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan".<sup>100</sup>

Kedudukan *VeR Veteriner* dalam pembuktian proses acara pidana, tergolong sebagai :

1) Alat bukti surat

Sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 huruf c KUHAP yang memuat bahwa surat yang dimaksud adalah surat yang berisi keterangan dari ahli atas segala hal yang sesuai dengan permintaan resmi daripadanya.

2) Alat bukti keterangan ahli

<sup>100</sup> *Ibid*,



Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186 KUHP yaitu pendapat dari ahli yang dikemukakan pada persidangan.

Maka dapat diketahui bahwa seorang ahli dokter forensik hewan dapat membantu pembuktian dengan berupa keterangan baik secara lisan (keterangan ahli) maupun berupa keterangan tertulis dari hasil pemeriksaan (surat). Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari R. Soeparmono, yaitu "*Visum Et Repertum* dalam pembuktian proses acara pidana dapat berperan sebagai alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli".

Dapat dikatakan sebagai alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHP, yang menyatakan "Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya".

Begitu pula dapat dikatakan sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Stb. 1937-350 *jo.* Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 1 Stb. 1937-350 menyatakan "Visa Reperta seorang dokter, yang dibuat baik atas sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu penyelesaian pelajaran di Negeri Belanda ataupun di Indonesia, merupakan alat bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama visa reperta tersebut berisikan keterangan-keterangan hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda yang diperiksa".<sup>101</sup>

Dengan melampirkan bukti laporan hasil pemeriksaan *VeR Veteriner* dalam dokumen kasus pada bagian Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik atau saat pemeriksaan di proses penuntutan, saat dianggap telah mencukupi, maka bukti *VeR Veteriner* menjadi alat bukti yang sah dalam kategori surat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHP, surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti sah menurut Undang-Undang, antara lain :

- a) "Surat yang dibuat atas sumpah jabatan;
- b) Surat yang dikuatkan dengan sumpah".

Pada dasarnya, alat bukti surat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah surat resmi yang pembentukannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Akan tetapi, guna surat tersebut memiliki nilai sebagai alat bukti

<sup>101</sup> R. Soeparmono, *Op.cit*, hal 125



yang sah dalam perkara pidana, maka haruslah ada keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar, dan dialami oleh yang membuat surat, yang dimuat didalamnya dan dijelaskan dengan jelas. Surat yang berdasar atas ketentuan perundang-undangan dan dibuat oleh pejabat tersebut didalamnya memuat segala hal yang menjadi tanggungjawabnya dan guna kepentingan pembuktian atas suatu hal atau keadaan. Sehingga, dalam hal ini *Ver Veteriner* dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah yang berisi keterangan oleh ahli yang berwenang atas sumpah jabatan dalam bentuk tertulis serta sebagai perantara hubung ilmu kedokteran hewan dan ilmu hukum.

Sedangkan apabila dalam proses peradilan hakim ragu terhadap hasil *Ver Veteriner*, maka hakim dapat memanggil dokter yang membuat *Ver Veteriner* terkait ke persidangan guna menguraikan dan mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya. Dalam hal pemanggilan ahli dokter hewan forensik tersebut, maka menjadi alat bukti yang sah dalam kategori keterangan ahli pada bidang ilmu kedokteran forensik.

Dalam hal ini tentunya dokter hewan forensik juga ikut andil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hewan, karena dokter hewan forensik merupakan bagian dari otoritas veteriner sebagai pemantau dan pengontrol kejahatan terhadap hewan dan aspek lain dari kesejahteraan hewan<sup>102</sup>.

Dokter hewan forensik sebagai bagian dari otoritas veteriner memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, yang menyatakan<sup>103</sup> :

- 2) "Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
  - b. Pelaksanaan *Visum Et Repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya Hewan oleh penyakit Hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, Hewan, dan/ atau lingkungan;
  - c. Pengesahan penerapan prinsip Kesejahteraan hewan;
  - d. Pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
  - e. Pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular

<sup>102</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang **Otoritas Veteriner**, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6019

<sup>103</sup> *Ibid*,



- tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah;
- f. Pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
  - g. Pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
  - h. Pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
  - i. Penutupan sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
  - j. Pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan”.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa dokter hewan berhak melakukan pemeriksaan untuk laporan hasil *VeR*. Namun dalam Peraturan tersebut tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai apakah *VeR* Veteriner dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana yang berkaitan dengan hewan, padahal dapat diketahui bahwa hal ini sangatlah penting untuk pembuktian pemeriksaan perkara agar lebih jelas duduk perkaranya. Bahkan *VeR Veteriner* dapat dikatakan sebagai sarana utama dalam penyidikan perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa hewan. Karena tubuh hewan berpotensi untuk beralih wujud menjadi busuk, tentunya dengan keadaan seperti itu tidak memungkinkan untuk dihadirkan di muka persidangan, sehingga dapat diketahui bahwa kehadiran *VeR Veteriner* menjadi pengganti sepenuhnya dari barang bukti (*Corpus Delicti*).

Berdasarkan kekuatan pembuktiannya, *VeR Veteriner* dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna atas segala fakta yang terkandung di dalamnya disertai dengan kesimpulan dokter hewan forensik berdasarkan fakta tersebut. *VeR Veteriner* dapat dikatakan sebagai alat bukti sah yang



dapat berguna untuk menguatkan keyakinan hakim dalam persidangan, dikarenakan telah memenuhi syarat berikut<sup>104</sup> :

1. Syarat Formil

Ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti surat dalam Pasal 187 huruf c KUHP, yang dibuat dengan resmi berdasarkan standar formalitasnya dari Undang-Undang dan berdasarkan jabatannya, sehingga terkategori surat yang memiliki keotentikan, maka dapat disimpulkan *VeR Veteriner* merupakan alat bukti yang sempurna.

2. Syarat Materiil

Esensi dari substansi yang tertuang dalam *VeR Veteriner* berdasar atas fakta yang diperiksa langsung oleh seorang ahli yakni dokter hewan forensik

Dalam hal ini, *VeR Veteriner* juga memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam penyelesaian perkara pidana kejahatan terhadap satwa yang dalam hal ini adalah pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi, karena :

1. *VeR Veteriner* mencukupi syarat formil dan syarat materiil.
2. *VeR Veteriner* diajukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan olehnya yaitu hakim, jaksa penuntut umum, dan penyidik.
3. Hasil dari laporan pemeriksaan *VeR Veteriner* dapat dengan mudah dimengerti oleh selain dokter.
4. Substansi isi dari *VeR Veteriner* telah sesuai dan relevan dengan yang diminta sesuai keperluan penegakan hukum.

Dengan berdasar pada yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa *VeR Veteriner* dalam bentuk laporan tertulis atas hasil pemeriksaan medis dalam perkara pidana tindak pidana terhadap satwa dilindungi merupakan alat bukti yang sah serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu, dalam penegakan hukumnya, diharapkan lebih tegas pelaksanaannya dan juga penyidik, penuntut umum, hakim, serta dokter hewan forensik dapat bekerja bersama-sama dalam upaya memberikan perlindungan pada satwa yang dilindungi.

<sup>104</sup> Sofyan Dahlan, **Ilmu Kedokteran Forensik**, Sinar HS, Semarang, 2012, hal 63



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Urgensi dari *VER Veteriner* ini dapat dilihat dari banyaknya kasus kejahatan terhadap satwa dilindungi yang terhenti karena kurangnya alat bukti. *VER Veteriner* ini berperan sangat penting dalam membantu penyidik mengarahkan jalannya penyidikan, mengidentifikasi spesies satwa, mengetahui waktu/saat kematian, mengetahui tempat kejadian perkara, mengetahui *Cause of Death* (penyebab kematian), mengetahui alat bantu yang digunakan, serta mengidentifikasi perbedaan antara kematian oleh manusia atau non-manusia (seperti pemangsaan/kecelakaan). Bahkan berdasarkan keakuratannya, dapat juga memudahkan penyidik dalam mengidentifikasi bukti yang mungkin menghubungkan dengan suatu tersangka tertentu. Selain itu, *VER Veteriner* juga membantu PU menentukan jenis penuntutan, serta memberikan keyakinan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Jika dilihat dari seberapa pentingnya *VeR Veteriner*, maka diharapkan adanya sebuah pengakuan yang dituangkan dalam norma dari perkembangan ilmu forensik veteriner yang dapat digunakan sebagai metode pendekatan penegakan hukum yang baru. Hal ini bertujuan agar para penegak hukum dapat mengetahui dengan jelas terkait penggunaan *VeR Veteriner* dan juga dapat memiliki kekuatan mengikat sebagai alat bukti.
2. Kekuatan pembuktian *VeR Veteriner* ini sejajar dengan alat bukti sah lainnya, karena dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 187 huruf c KUHP, karena didalamnya memuat pendapat dari seorang ahli atas sumpah jabatannya dan diminta secara resmi (tertulis) oleh hakim, penuntut umum, maupun penyidik mengenai suatu hal yang berkaitan dengan keahliannya. Disamping itu *VeR Veteriner* juga dapat dikategorikan



sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana ketentuan Pasal 186 KUHP, bilamana keterangan atas hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh dokter hewan forensik dalam persidangan.

## B. Saran

Berdasarkan atas kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan kontribusi dengan merumuskan saran yang ditujukan untuk pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Bagi masyarakat, diharapkan untuk peka dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan satwa khususnya satwa yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
2. Bagi penyidik, sebagai saran serta sumbangan pemikiran kedepannya untuk perkembangan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana satwa yang dilindungi. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, maka diharapkan kedepannya penyidik lebih memanfaatkan lagi peran ahli yang dalam hal ini adalah ahli kedokteran hewan forensik dalam membantu terlaksananya penegakan hukum terhadap satwa dilindungi.
3. Bagi kedokteran hewan forensik, sebagai masukan bahwa dokter hewan forensik dapat pula ikut serta dalam upaya penegakan hukum terkait perkara pidana terhadap satwa dilindungi. Dan sebagai tambahan wawasan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh dokter hewan forensik dalam bentuk *VeR Veteriner* dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana terkait satwa yang didukung juga oleh regulasi yang berlaku di Indonesia.
4. Bagi Pemerintah, sebagai saran dan masukan kedepannya untuk mengatur secara lanjut terkait kejelasan produk hukum dari keabsahan *VeR Veteriner* sebagai alat bukti dalam perkara pidana tindak pidana terhadap satwa, dan juga perlunya pelebaran terkait aspek-aspek lain yang mungkin berbeda dengan klasifikasi tindak pidana terhadap manusia.
5. Bagi akademisi, sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai perkembangan terkait penegakan hukum di Indonesia, berdasarkan peran dari gabungan antara ilmu kedokteran dengan ilmu hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Mukti Fajar, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana, Jakarta, 2014.
- Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum (Cetakan III)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tim Prima Pena, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Gitamedia Press, Bandung, 2012.
- J.C.T Simorangkir dkk, **Kamus Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- R.Atang Ranomihardja, **Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensick Science)**, Penerbit Tarsito, Bandung, 1983.
- Wahyudi, **Ilmu kedokteran kehakiman dalam perspektif peradilan dan aspek hukum praktik kedokteran**, Jdambatan, Jakarta, 2000.
- C.S.T Kansil, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Munir Fuady, **Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Supriyadi Widodo Eddyono, **Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**, Elsam, Jakarta, 2007.



R. Atang Ranoemiharja, **Hukum Acara Pidana**, Penerbit Tarsito, Bandung, 1980.

B. Fachri Nasution, **Himpunan Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung RI**, Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Suharto RM, **Penuntutan dalam Praktek Peradilan**, cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Andi Hamzah, **Terminologi Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Bambang Poernomo, **Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1997

Moeljatno, **Azas-azas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1983

Ismu Gunadi, dkk, **Hukum Pidana**, Kencana, Jakarta, 2014

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana 1**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007

Amir Ilyas, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, 2012

Wiratno, dkk, **Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional**, The Gibon Foundation, Jakarta, 2001.

Leden Marpaung, **Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Satwa**, Erlangga, Jakarta, 1995.

Alfitra, **Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia**, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Eddy O.S. Hiariej, **Teori Hukum dan Pembuktian**, Erlangga, Jakarta, 2012.

R. Soeparmono, **Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana**, CV. Madar Maju, Bandung, 2016.

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana I**, Rajawali Press, Jakarta, 2002.



Andi Hamzah, **Hukum dan Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Syaiful Bakhri, **Beban Pembuktian**, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, **Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana**, Sinar Wijaya, Surabaya, 1996.

Herkutanto, **Visum et Repertum dan Pelaksanaanya**, Ghalia, Jakarta, 2006.

Sofyan Dahlan, **Ilmu Kedokteran Forensik**, Sinar HS, Semarang, 2012.

Ahmad Yudianto, **Ilmu Kedokteran Forensik**, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020

## 2. Jurnal

H.M. Soedjatmiko, **Ilmu Kedokteran Forensik**, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, 2001.

Luthfi Arya dan Heri Purwanto, **Peran Bantuan Ahli Ilmu Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan pada Tahap Penyidikan**, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2020.

Michael Barama, SH., MH, **Satu Saksi Bukan Saksi dalam Perkara Pidana**, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011.

Setyo Trisnadi, **Ruang Lingkup Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang**, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultas Agung, Semarang, 2013.

## 3. Skripsi/ Thesis/ Disertasi

Cindy Zafira Husna, **Analisis Perbandingan Ruang Lingkup Dan Sanksi Insider Trading Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Securities Exchange Act Of**



**1934** (Studi Pengaturan di Indonesia dan Amerika Serikat), Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

Ibnu Imam Ayatollah, **Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pengguguran Kandungan / Aborsi** (Studi Kasus di Kota dari Tahun 2009-2012), Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Muhammad Irfan, **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Satwa Orang Utan Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 di Wilayah Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit** (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara), Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

Rini Mirza, **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi**, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2016.

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang **Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang **Peraturan Hukum Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang **Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang **Hukum Acara Pidana**, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang  
**Otoritas Veteriner**, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 20,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6019.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang **Pengawetan Jenis  
Tumbuhan dan Satwa Liar**, Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1999 Nomor 14.

## 5. Sumber Arsip

*Staatsblad Van Nederlandsh Indie*, Tahun 1937, Nomor 350

## 6. Website

Hariyawan, **Catatan Akhir Tahun : Indonesia, Negara  
Megabiodiversity Yang Rentan Kehilangan Satwa Dilindungi**,  
MONGABAY Situs Berita Lingkungan, (9 Oktober 2020), 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/satwa> (15 Februari 2021)

ProFauna Admin, **Catatan ProFauna Indonesia tahun 2012 :  
Perdagangan Satwa Langka Secara Online Semakin Marak**,  
<https://www.profauna.net/id/perdagangan-satwaliar/2012/catatan-profauna-indonesia-tahun-2012-perdagangan-satwa-langka-secara-online-semakinmarak#.Wu86ivW-m00> (15 Februari 2021), 2012.

Chairul Saleh, **Conservation Science for Flagship Species Coordinator  
WWF-Indonesia**, <https://www.wwf.or.id/?26740/Menyelamatkan-yangTersisa-dari-Perdagangan-Ilegal-Satwa-Liar> (15 Februari 2021), 2012.

Drh. Nadia Yohana, **Dokter Hewan Forensik dan Visum Et Repertum**,  
<https://mediaindonesia.com/opini/203618/dokter-hewan-forensik-dan-visum-et-repertum>, (10 Oktober 2020), 2018.